



DATA LAPANGAN TEP JADI DASAR KEBIJAKAN EKONOMI TRANSMIGRASI

Menko IPK AHY (Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono) didampingi Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara memberikan keterangan kepada wartawan usai pembekalan Tim Ekspedisi Patriot 2026, di Jakarta, Rabu (29/7/2026). Menko IPK AHY mengatakan data lapangan Tim Ekspedisi Patriot (TEP) akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pengembangan ekonomi kawasan transmigrasi.

Transformasi Digital dan Penguatan Industri MICE Dorong Daya Saing Pariwisata Indonesia

Acara SEABEF 2026 merupakan forum regional tahunan yang mempertemukan para pembuat kebijakan, asosiasi, akade-misi, dan pelaku industri Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) dari berbagai negara.

JAKARTA (LB) - Di tengah ketidakpastian ekonomi global, Indonesia terus memperkuat berbagai sumber pertumbuhan ekonomi, termasuk melalui sektor pariwisata dan segmen industri Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE). Sebagai bagian dari industri penyelenggaraan event, segmen MICE memiliki peran strategis dalam mendorong aktivitas ekonomi melalui penyelenggaraan pertemuan, perjalanan, konvensi, dan pameran berskala nasional maupun internasional. Penguatan ekosistem MICE dan industri event mampu memberikan efek berganda (multiplier effect) bagi perekonomian melalui peningkatan aktivitas pariwisata, investasi, perdagangan, serta penciptaan lapangan kerja. “Terlepas dari ketidakpastian dan situasi global yang sulit diprediksi, Indonesia masih mampu tumbuh sebesar 5,61 persen pada kuartal pertama. Dan sektor pariwisata, yang didukung oleh penyediaan akomodasi serta penyediaan makan dan minum, memimpin pertumbuhan sektoral dengan angka dua digit, yaitu 13,14

persen,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara Southeast Asia Business Events Forum (SEABEF) 2026 yang mengusung tema Beyond Business Events: Redefining the Future of Events as a Catalyst for Competitive, Sustainable, and High-Value Tourism Growth di Jakarta, Rabu (29/7). Acara SEABEF 2026 merupakan forum regional tahunan yang mempertemukan para pembuat kebijakan, asosiasi, akademisi, dan pelaku industri Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) dari berbagai negara. Forum ini menjadi wadah kolaborasi untuk membahas arah kebijakan, tren global, inovasi, serta peluang pengembangan industri event dan MICE sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi, daya saing pariwisata, dan pembangunan yang berkelanjutan di kawasan Asia Tenggara. Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga menyampaikan bahwa sektor pariwisata terus menunjukkan kinerja positif. Pada Mei 2026, Indonesia mencatat kunjungan wisatawan mancanegara

sebanyak 1,38 juta kunjungan dan sekitar 106,16 juta perjalanan wisatawan nusantara, yang keduanya meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Menurut Airlangga, perkembangan industri penyelenggaraan event global juga menunjukkan adanya pergeseran pasar menuju perpaduan antara kegiatan bisnis dan wisata atau bleisure, bukan sekadar perjalanan wisata. Bleisure sendiri adalah gabungan dari perjalanan bisnis (business travel) dan liburan (leisure travel), di mana seseorang memperpanjang masa tinggalnya di suatu tempat untuk menikmati waktu luang atau berwisata sebelum maupun sesudah urusan kerja. Pergeseran tersebut membuka peluang bagi Indonesia untuk mengintegrasikan penyelenggaraan event dengan

berbagai destinasi unggulan, sehingga mampu menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi sektor pariwisata sekaligus mendorong aktivitas ekonomi di daerah. Sejalan dengan upaya tersebut, Pemerintah terus mendorong transformasi sektor pariwisata melalui pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence atau AI) guna menghadirkan pengalaman wisata yang lebih inovatif, personal, dan berdaya saing. Salah satunya yakni melalui program Pariwisata 5.0. “Melalui program unggulan Pariwisata 5.0 kami, Indonesia terus mempercepat transformasi digital di sektor pariwisata. Tahun lalu, kami meluncurkan MaiA, sebuah rencana perjalanan berbasis AI melalui Indonesia.travel, yang mempermudah penemuan

destinasi sekaligus menjadikan proses perencanaan perjalanan lebih lancar dan personal,” ujar Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana. Pariwisata 5.0 (Tourism 5.0) merupakan pendekatan pengembangan pariwisata yang mengintegrasikan teknologi digital, AI, dan pemanfaatan data untuk menghadirkan pengalaman berwisata yang lebih personal, berkualitas, dan berkelanjutan dengan tetap berpusat pada kebutuhan wisatawan. Sebagai bagian dari transformasi tersebut, Kementerian Pariwisata menghadirkan MaiA (Meticulous Artificial Intelligence of Indonesia) sebagai asisten perjalanan digital yang membantu wisatawan memperoleh rekomendasi destinasi dan menyusun rencana perjalanan secara lebih mudah dan personal. ●hen

Kawasan Industri Harus Jadi Instrumen Pemerataan Ekonomi

JAKARTA (LB) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan kawasan industri harus menjadi instrumen pemerataan pembangunan dengan menciptakan pusat pertumbuhan baru, menarik investasi, membuka lapangan kerja, dan melibatkan usaha masyarakat di berbagai daerah. Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional Kemenperin Tri Supondy

mengatakan pengembangan kawasan industri perlu disesuaikan dengan karakteristik dan potensi setiap wilayah. “Tujuannya bukan sekadar memindahkan industri ke luar Jawa, tetapi juga menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru di Indonesia,” kata Tri dalam pembekalan Tim Ekspedisi Patriot 2026 di Jakarta, Rabu (29/7). Tri menjelaskan, pengembangan industri di

Pulau Jawa diarahkan terutama pada kegiatan berbasis teknologi tinggi dan hemat air karena tingginya kepadatan aktivitas ekonomi di wilayah tersebut. Sementara itu, pengembangan industri di luar Jawa difokuskan pada pengolahan sumber daya alam dan industri padat karya agar mampu meningkatkan nilai tambah komoditas sekaligus memperluas kesempatan kerja. ●dro

Potensi EBT 3.687 GW Buka Ruang Bagi Pengembangan Energi Bersih

JAKARTA (LB) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyatakan potensi energi baru terbarukan Indonesia sebesar 3.687 gigawatt membuka ruang pengembangan energi bersih untuk memperkuat ketahanan energi dan pembangunan daerach. “Indonesia juga memiliki potensi energi baru terbarukan yang sangat besar, yaitu mencapai 3.687 GW, dengan dominasi tenaga surya, hidro, dan angin,” kata Inspektur Jenderal Kementerian ESDM Yudhiawan dalam pembekalan Tim Ekspedisi Patriot 2026 di Jakarta, Rabu (29/7). Ia menyebut kapasitas pembangkit EBT yang telah terpasang hingga Juni 2026 baru mencapai sekitar 16.321 megawatt (MW) atau 16,32 gigawatt (GW). Menurut dia, selisih antara besarnya potensi dan kapasitas terpasang menunjukkan masih tersedia ruang luas untuk mempercepat pemanfaatan energi bersih di Indonesia. Pengembangan EBT tidak hanya diarahkan untuk memperkuat ketahanan dan kemandirian energi nasional, tetapi juga menopang pembangunan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. “Akselerasi pemanfaatan EBT tidak hanya memperkuat ketahanan energi, tetapi juga menjadi penopang pembangunan kawasan transmigrasi, menghadirkan pasokan energi yang bersih dan berkelanjutan,” ujarnya. Yudhiawan mengatakan pemerintah menyiapkan pembangunan pembangkit listrik nasional berkapasitas 69,5 GW, dengan tambahan pembangkit berbasis EBT mencapai 43,6 GW. Pengembangan pembangkit tersebut didukung rencana pembangunan jaringan transmisi sepanjang 47.758 kilometer dan gardu induk berkapasitas 107.950 megavolt ampere (MVA). Menurut dia, penguatan jaringan dan kapasitas pembangkit diperlukan untuk meningkatkan keandalan pasokan listrik, terma-

suk di kawasan transmigrasi serta wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Perluasan jaringan listrik menjadi pilihan bagi desa yang berada dekat jaringan distribusi, sedangkan sistem kelistrikan berskala kecil atau mini-grid berbasis EBT diarahkan untuk wilayah terpencil, kepulauan, dan permukiman yang tersebar. Yudhiawan menyebut wilayah Papua memiliki potensi energi terbarukan lokal, antara lain tenaga surya dan mikrohidro, yang dapat dimanfaatkan untuk menyediaan listrik secara berkelanjutan di wilayah yang sulit dijangkau. “Untuk wilayah yang sulit terjangkau, pendekatan berbasis energi lokal menjadi salah satu solusi agar masyarakat dapat memperoleh listrik secara berkelanjutan,” tuturnya. Pemerintah, lanjut dia, juga melanjutkan Program Listrik Desa dan Bantuan Pasang Baru Listrik guna memperluas akses energi bagi rumah tangga yang belum memperoleh layanan kelistrikan. Pada 2025, pembangunan kelistrikan desa mencakup 1.516 lokasi dan memberikan akses listrik kepada 77.616 rumah tangga. Program tersebut dilanjutkan pada 2026. Yudhiawan menilai penyediaan listrik di wilayah 3T dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta mendukung kegiatan pendidikan, kesehatan, dan perekonomian. “Listrik ini dalam rangka peningkatan kualitas hidup, pendidikan, kesehatan, dan tentu saja penguatan perekonomian,” ujarnya. Selain pengembangan EBT dan elektrifikasi, strategi menuju kedaulatan energi dijalankan melalui tiga pilar, yakni kemandirian energi, ketahanan energi, dan swasembada energi. Pemerintah menargetkan peningkatan cadangan energi nasional dari kisaran 18–21 hari menjadi sekurang-kurangnya 30 hari melalui peningkatan kapasitas penyimpanan minyak mentah nasional. Upaya swasembada energi juga mencakup peningkatan produksi siap jual atau lifting minyak dan gas bumi, pengembangan kendaraan listrik, pemanfaatan gas untuk menggantikan elpiji, serta peningkatan penggunaan energi bersih. ●dot

MULTI

BINTANG

INDONESIA

PT

PT MULTI BINTANG INDONESIA TBK DAN ENTITAS ANAK

PT

PT MULTI BINTANG INDONESIA TBK DAN ENTITAS ANAK

PT

PT MULTI BINTANG INDONESIA TBK DAN ENTITAS ANAK

PT MULTI BINTANG INDONESIA TBK DAN ENTITAS ANAK

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

30 JUNI 2026 DAN 31 DESEMBER 2025

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MULTI BINTANG INDONESIA TBK DAN ENTITAS ANAK

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

UNTUK PERIODE ENAM BULAN

YANG BERAKHIR PADA 30 JUNI 2026 DAN 2025

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MULTI BINTANG INDONESIA TBK DAN ENTITAS ANAK

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

UNTUK PERIODE ENAM BULAN

YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026 DAN 2025

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

ASET	30 Juni 2026	31 Desember 2025	LIABILITAS DAN EKUITAS	30 Juni 2026	31 Desember 2025
ASET LANCAR			LIABILITAS JANGKA PENDEK		
KAS	1.290.928	982.613	UTANG USAHA	524.180	287.160
PIUTANG USAHA			PIHAK KETIGA	6.158	-
PIHAK KETIGA	659.590	547.130	PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK	75.000	75.000
PIHAK BERELASI	1.391	1.564	UTANG PAJAK		
PERSEDIAAN	281.411	201.477	PAJAK PENGHASILAN BADAN	54.433	146.727
KLAIM PENGEMBALIAN PAJAK	37.984	664	PAJAK-PAJAK LAINNYA	109.524	46.806
BEBAN DIBAYAR DIMUKA	106.044	46.423	JAMINAN EMBALASI	158.558	152.528
ASET DERIVATIF	869	325	LIABILITAS DERIVATIF	-	256
ASET LANCAR LAINNYA	34.035	65.847	LIABILITAS SEWA - BAGIAN JANGKA PENDEK	10.249	9.930
JUMLAH ASET LANCAR	2.412.252	1.846.043	BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR	1.858.727	1.261.917
ASET TIDAK LANCAR			DAN UTANG LAIN-LAIN	2.796.829	1.980.324
ASET TETAP	1.313.216	1.305.836	JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK	71.907	76.114
ASET HAK-GUNA	22.886	27.516	LIABILITAS JANGKA PANJANG	12.745	10.923
ASET PAJAK TANGGUHAN	180.444	178.421	LIABILITAS IMBALAN KERJA	17.300	21.938
KLAIM PENGEMBALIAN PAJAK	71.905	94.919	LIABILITAS SEWA - BAGIAN JANGKA PANJANG	10.740	9.397
GOODWILL	11.232	-	LIABILITAS JANGKA PANJANG LAINNYA	112.692	118.372
ASET TIDAK LANCAR LAINNYA	2.892	3.911	JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG	2.909.521	2.098.696
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	1.602.575	1.610.603	JUMLAH LIABILITAS		
JUMLAH ASET	4.014.827	3.456.646	ASET LANCAR LAINNYA		
			JUMLAH ASET		

 | | 2026 | 2025 | |--|-----------|-----------| | PENJUALAN BERSIH | 1.719.760 | 1.471.845 | | BEBAN POKOK PENJUALAN | (652.509) | (604.527) | | LABA KOTOR | 1.067.251 | 867.318 | | Beban penjualan | (221.006) | (180.453) | | Beban umum dan administrasi | (171.153) | (133.051) | | Laba (rugi) selisih kurs - bersih | (3.125) | 118 | | Pendapatan lain-lain | 249 | 623 | | LABA OPERASI | 672.216 | 554.555 | | Beban keuangan | (2.995) | (5.456) | | Pendapatan keuangan | 11.445 | 16.769 | | BEBAN KEUANGAN BERSIH | 8.450 | 11.313 | | LABA SEBELUM PAJAK | 680.666 | 565.868 | | Beban pajak penghasilan | (151.443) | (140.080) | | LABA | 529.223 | 425.788 | | JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF | 529.223 | 425.788 | | JUMLAH LABA BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA: | | | | Pemilik entitas induk | 529.118 | 425.750 | | Kepentingan nonpengendali | 105 | 38 | | JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA: | | | | Pemilik entitas induk | 529.118 | 425.750 | | Kepentingan nonpengendali | 105 | 38 | | Laba dasar per saham dasar (dalam nilai penuh) | 251 | 202 | | | | 2026 | 2025 | |--|-----------|-----------| | ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI: | | | | Penerimaan kas dari pelanggan | 1.613.503 | 1.495.230 | | Pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan | (965.927) | (854.782) | | Kas dihasilkan dari operasi | 647.576 | 640.448 | | Penerimaan bunga | 11.445 | 16.769 | | Pembayaran bunga | (5.046) | (5.456) | | Pembayaran kas untuk pajak penghasilan | (249.967) | (270.565) | | Penerimaan pengembalian pajak | - | 15.958 | | Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi | 404.008 | 397.154 | | ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI: | | | | Perolehan aset tetap dan aset hak-guna | (90.256) | (84.418) | | Hasil penjualan aset tetap | 2.218 | - | | Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi | (88.038) | (84.418) | | ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN: | | | | Pembayaran dividen tunai | (358) | (697.280) | | Pembayaran liabilitas sewa | (7.297) | (7.411) | | Penerimaan utang bank jangka pendek | 75.000 | 250.000 | | Pembayaran utang bank jangka pendek | (75.000) | (300.000) | | Kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan | (7.655) | (754.691) | | KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS | 308.315 | (441.955) | | KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE | 982.613 | 1.055.927 | | KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE | 1.290.928 | 613.972 | |

Catatan:

Laporan Keuangan Konsolidasian pada dan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 tidak diaudit.

Jakarta, 30 Juli 2026

Direksi

PT MULTI BINTANG INDONESIA TBK